



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. LKj IP Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Sosial Kota Semarang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKj IP kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, 15 Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA SEMARANG



HEROE SOEKENDAR, S.Sos

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum Organisasi .....	1
1. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi .....	1
2. Struktur Organisasi .....	2
3. Sumberdaya Manusia .....	5
4. Sarana dan Prasarana .....	6
5. Anggaran dan Belanja .....	8
C. Aspek Strategi dan Permasalahan Utama .....	8
D. Landasan Hukum .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategi 2021 – 2026 .....	11
B. Perencanaan Kinerja .....	19

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi .....	23
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	24
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya .....	27
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD ...	29
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional .....	30
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan .....	30
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	33
7. Analisis Program/Kegiatan Tahun 2023 yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	35
B. Realisasi Anggaran .....	44

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum .....	49
B. Rekomendasi .....	50

### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	5
Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang .....	5
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Tahun 2023 .....	6
Tabel 1.4 Program dan Anggaran APBD Tahun 2023 .....	8
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Semarang .....	15
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Semarang .....	16
Tabel 2.3 Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan .....	18
Tabel 2.4 Perencanaan Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang .....	20
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Semarang .....	21
Tabel 2.6 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial .....	21
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 .....	22
Tabel 3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	24
Tabel 3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya .....	27
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD .....	29
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional .....	30
Tabel 3.5 Analisis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 .....	30
Tabel 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dsya .....	33
Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan Tahun 2023 yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	35
Tabel 3.8 Realisasi Indikator Kinerja dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023 .....	40
Tabel 3.9 Realisasi Indikator Kinerja dalam Program Penanganan Bencana .....	42
Tabel 3.10 Realisasi Indikator Kinerja dalam Program Pemberdayaan Sosial .....	44
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 .....	44
Tabel 3.12 Rincian Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ....	44

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Guna lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LKj IP 2023 dan Penetapan Kinerja (PK) 2024. LKj IP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Sedangkan Dokumen PK/TAPKIN merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2016 tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **1. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

Atas dasar tugas pokok tersebut diatas, yang menjadi tanggung jawab dan fungsi Dinas Sosial antara lain:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD;

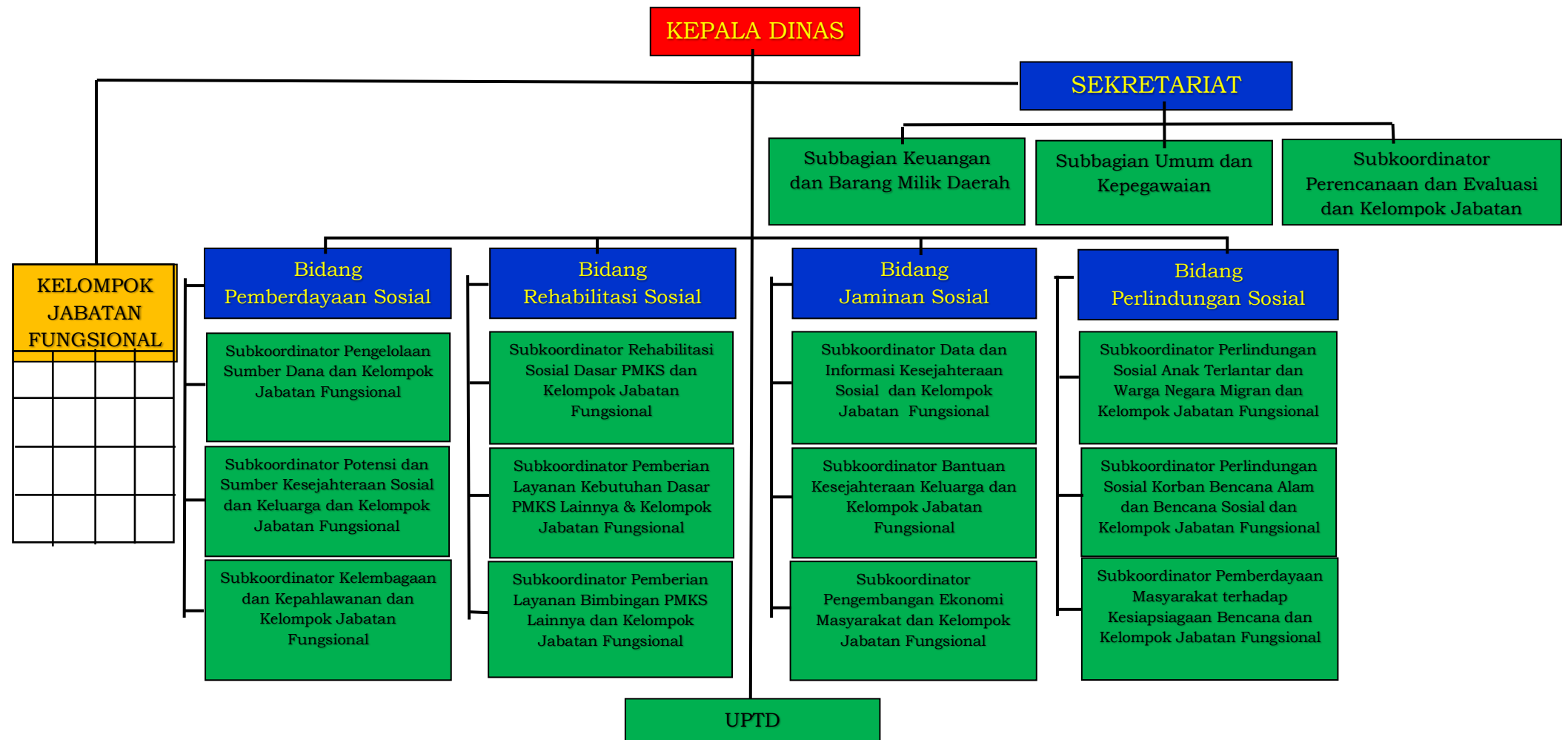
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
  5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial;
  6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
  7. Penyelenggaraan program dan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD;
  8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD;
  9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang nomor 99 Tahun 2021, susunan organisasi Dinas Sosial Kota Semarang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :
  1. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana;
  2. Sub Koordinator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga; dan
  3. Sub Koordinator Kelembagaan dan Kepahlawanan.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
  1. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS;
  2. Sub Koordinator Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya; dan
  3. Sub Koordinator Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya.
- e. Bidang Jaminan Sosial, terdiri atas :
  1. Sub Koordinator Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
  2. Sub Koordinator Bantuan Kesejahteraan Keluarga; dan
  3. Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- f. Bidang Perlindungan Sosial, terdiri atas :
  1. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran;
  2. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial; dan

3. Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana.
  - g. UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo;
  - h. Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG



### 3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Sosial Kota Semarang pada Desember 2023, Dinas Sosial memiliki SDM sebanyak 103 orang dengan yang terdiri dari 45 orang pegawai ASN dan 58 orang pegawai Non ASN. Berdasarkan jenjang Pendidikan untuk ASN terdiri dari 1 (satu) orang berpendidikan Doktor, 8 (delapan) orang berpendidikan pasca sarjana, 28 (dua puluh delapan) orang berpendidikan sarjana, 3 (tiga) orang berpendidikan sarjana muda, dan 5 (lima) orang berpendidikan SLTA. Jenjang Pendidikan untuk Non ASN terdiri dari 3 (tiga) orang berpendidikan sarjana, 33 (tiga puluh tiga) orang berpendidikan sarjana muda, dan 22 (dua puluh dua) orang berpendidikan SLTA.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN dan Non ASN**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh ASN (%)	Jumlah (Pegawai)	persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh ASN (%)
<b>Perguruan Tinggi</b>		<b>40</b>	<b>89%</b>	<b>39%</b>	<b>36</b>	<b>62%</b>	<b>35%</b>
1	S3	1	2%	1%	0	0%	0%
2	S2	8	18%	8%	0	0%	0%
3	S1	28	62%	27%	3	5%	3%
4	D3	3	7%	3%	33	57%	32%
<b>Bukan Perguruan Tinggi</b>		<b>5</b>	<b>11%</b>	<b>5%</b>	<b>22</b>	<b>38%</b>	<b>21%</b>
1	SMA	5	11%	5%	22	38%	21%
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>100%</b>	<b>44%</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>	<b>56%</b>
<b>Jumlah Seluruh Pegawai</b>		<b>103</b>					

Sedangkan menurut pangkat dan golongan yaitu 8 (delapan) orang golongan IV, 30 (tiga puluh) orang golongan III, 5 (lima) orang golongan II, dan 2 (dua) orang golongan IX (PPPK).

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023**  
**Berdasarkan Golongan / Ruang**

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
<b>PNS</b>		<b>43</b>	<b>96%</b>
1	Golongan IV	8	18%
2	Golongan III	30	67%
3	Golongan II	5	11%
<b>PPPK</b>		<b>2</b>	<b>4%</b>
4	Golongan IX	2	4%
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>100%</b>

#### 4. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana juga merupakan modal penting bagi kelancaraan aktivitas kegiatan di Dinas Sosial Kota Semarang, secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Semarang dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.3**  
**Sarana dan Prasarana Tahun 2023**

No	Jenis Barang	Jumlah
	<b>Sarana Transportasi</b>	
1	Roda 4	16
2	Trail	2
3	Sepeda Motor	24
	<b>Peralatan dan Perlengkapan</b>	
1	Pompa Air	3
2	Trolley Car/Lori	13
3	Hand Fallet	4
4	Lemari Penyimpan	2
5	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	4
6	Lemari Besi/Metal	6
7	Lemari Kayu	11
8	Rak Besi	4
9	Rak Kayu	1
10	Filing Cabinet Besi	59
11	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	4
12	Kontainer	1
13	Lemari Kaca	16
14	Lemari Makan	6
15	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	2
16	CCTV - Camera Control Television System	27
17	White Board	4
18	Alat Penghancur Kertas	1
19	Mesin Absensi	1
20	alat-alat sandi lainnya (dst)	1
21	LCD Projector/Infocus	5
22	Papan Nama Instansi	5
23	Papan Pengumuman	2
24	Alat Kantor Lainnya	2
25	Meja Kerja Kayu	49
26	Kursi Besi/Metal	38
27	Kursi Kayu	1
28	Meja Rapat	11
29	Tempat Tidur Besi	10
30	Meja Ketik	5
31	Meja 1/2 Biro	7
32	Meja Makan Besi	3
33	Kursi Rapat	45
34	Kursi Tamu	1
35	Kursi Putar	14
36	Bangku Tunggu	1
37	Kursi Lipat	134
38	Meja Komputer	7

No	Jenis Barang	Jumlah
39	Sofa	2
40	Meubeleur lainnya	12
41	Mesin Cuci	2
42	Lemari Es	5
43	A.C. Split	33
44	Kipas Angin	34
45	Kompor Gas (Alat Dapur)	1
46	Tabung Gas	1
47	TV Monitor	9
48	Loudspeaker	57
49	Sound System	1
50	Microphone	5
51	Unit Power Supply	5
52	Camera Film	9
53	Tangga Aluminium	4
54	Dispenser	34
55	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5
56	Alat Pemadam/Portable	10
57	Meja Kerja Pejabat	15
58	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	13
59	Meja Tamu Biasa	2
60	Kursi Kerja Pejabat	17
61	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	10
62	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	61
63	Kursi Kerja Pejabat lainnya	10
64	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	8
65	Microphone/Wireless MIC	1
66	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
67	Tripod Camera	1
68	Lensa Kamera	1
69	Layar Film/Projector	3
70	Head Set	1
71	LCD Monitor	1
72	Alat Studio Lainnya	5
73	Telephone (PABX)	21
74	Handy Talky (HT)	2
75	Facsimile	3
76	Wireless Amplifier	2
77	Alat Kedokteran lainnya	3
78	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi	2
79	Timbangan Badan (Alat Kesehatan	2
80	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	11
81	Exhaust Fan	7
82	Personal Computer	110
83	Meja Kerja	17
84	Lap Top	21
85	Printer (Peralatan Personal Komputer)	83
86	Server	1
87	Hub	1
88	Tenda	3

## 5. Anggaran dan Belanja

Pada tahun 2023 anggaran Dinas Sosial Kota Semarang sebesar Rp 35.272.253.286,- dengan capaian realisasi belanja sebesar Rp 31.385.954.802,- atau sebesar 88,98%, anggaran tersebut digunakan untuk mendanai 6 (enam) program kegiatan, dengan rincian dapat dilihat dalam table dibawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Program dan Anggaran APBD Tahun 2023**

No	Program	Anggaran	Belanja	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.737.798.025	10.450.397.565	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	7.651.690.831	7.284.645.019	APBD
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	45.413.532	30.659.070	APBD
4	Program Rehabilitasi Sosial	9.447.861.272	8.222.571.255	APBD
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.357.803.540	4.410.933.488	APBD
6	Program Penanganan Bencana	1.031.868.086	986.748.405	APBD

### C. Aspek Strategi dan Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi Dinas Sosial Kota Semarang antara lain:

1. Belum adanya Aplikasi pengolah data pada pelayanan data dan pengaduan sehingga mengakibatkan kurang akuratnya data guna pembuatan pelaporan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk pemenuhan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada umumnya dan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, serta korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota untuk bisa mendapatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial khususnya.

### D. Landasan Hukum

- a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

- Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
  - c. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023;
  - d. Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang;
  - e. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026;
  - f. Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023.

## **E. Sistematika Penulisan**

### Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
  1. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi
  2. Struktur Organisasi
  3. Sumberdaya Manusaia
  4. Sarana dan Prasarana
- A. Aspek Strategi dan Permasalahan Utama
- B. Landasan Hukum
- C. Sistematika Penulisan

### Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategi 2021 – 2026
  1. Visi
  2. Misi
  3. Tujuan SKPD
  4. Sasaran serta Kebijakan SKPD
  5. Program SKPD
- B. Perencanaan Kinerja
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
  2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya
  3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD
  4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program / Kegiatan Tahun 2023 yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

#### Bab IV Penutup

A. Kesimpulan Umum

B. Rekomendasi

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada tahun 2023 Dinas Sosial Kota Semarang bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu:

1. Menurunnya angka kemiskinan;
2. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
3. Peningkatan Laporan Kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2023 Dinas Sosial Kota Semarang telah menetapkan 6 program, 16 kegiatan dan 78 sub kegiatan.

#### **A. Rencana Strategi 2021 – 2026**

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Sosial Kota Semarang merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Semarang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kota Semarang, yaitu:

##### **1. Visi Kota Semarang**

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kota Semarang adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Makna dari visi tersebut adalah Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya, terbukti bahwa Kota metropolitan ini telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, menuntaskan rob

dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa lima tahun ke depan akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai Kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehingga menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Definisi SEMAKIN HEBAT dikandung pemahaman bahwa Visi tersebut melalui semangat seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota ingin menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

## **2. Misi Kota Semarang**

Guna mewujudkan Visi tersebut dirumuskan menjadi lima misi pembangunan daerah, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial;
- b. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila;
- c. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan;
- d. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota;
- e. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana halnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang berpedoman pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang tersebut adalah pada misi 1 (satu) yaitu **“Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial”**.

Misi Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial dengan tujuan **“Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas”**, sehingga diharapkan dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM yang unggul dan produktif dapat meningkatkan fungsi sosial ekonomi secara layak dan bermartabat serta dapat memutus mata rantai kemiskinan berbasis kemandirian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Model tersebut membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan Garis Kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan ini akan selalu dinamis mengikuti perkembangan inflasi dan harga pemenuhan kebutuhan makanan dan non makanan.

### **3. Tujuan SKPD**

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan yang memiliki titik kritis dalam penyusunan RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilahan-pilahan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dua dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat;  
(Indikator tujuan : Persentase Penduduk Miskin)
- b. Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

(Indikator tujuan : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani)

- c. Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas.

(Indikator tujuan : Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel)

Yang merupakan tujuan dari misi satu, yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.

#### **4. Sasaran serta Kebijakan SKPD**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hasil rumusan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya angka kemiskinan

(Indikator Sasaran : Menurunnya Angka DTKS)

- b. Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

(Indikator Sasaran : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani, Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota, Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi, Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial)

- c. Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel

(Indikator Sasaran : Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel)

Hubungan tujuan, sasaran dengan indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Semarang digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022 - 2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Angka Kemiskinan	%	4,56	4,32	4,30	4,25	4,20	4,15	
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka DTKS	%	24,23	16,10	15,80	15,50	15,20	14,90	
2	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	100	99,75	99,81	99,87	99,93	99,99	
		Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	100	99,75	99,81	99,87	99,93	99,99	
			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	%	71,42	66,67	78	89	100	100	
			Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial	%	63,37	69,15	69,85	70,54	71,25	71,96	
2	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas		Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel	%	100	100	100	100	100	100	
		Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	%	100	100	100	100	100	100	

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang telah menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Semarang**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>1, Menurunnya Angka Kemiskinan</p> <p>2, Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</p> <p>3, Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel</p>	<p>1, Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>2, Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</p>	<p>1, Penanganan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial</p> <p>2, Penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial</p> <p>3, Penanganan kepada Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk mendapatkan perlindungan sosial</p> <p>4, Melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti</p> <p>5, Melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) khususnya Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan kepada korban bencana alam dan sosial</p> <p>6, Penanganan kepada korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial di daerah kabupaten/kota pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p>

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7, Fasilitasi dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada bertujuan untuk mendukung penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial 8, Kerjasama dan kemitraan dengan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 9, Memfasilitasi/melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam penyaluran bantuan sosial reguler dan non reguler 10, Meningkatkan kualitas perencanaan program dan penganggaran 11, Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Dinas Sosial. 12, Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Dinas Sosial. 13, Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja Dinas Sosial.

#### 5. Program SKPD

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022 2026, ditetapkan 5 (lima) program – program utama yang menjadi *core business* Dinas Sosial Kota Semarang, diantaranya:

- a. Program Rehabilitasi Sosial
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- c. Program Penanganan Bencana
- d. Program Pemberdayaan Sosial
- e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selain program utama yang menjadi *core business* Dinas Sosial Kota Semarang, juga terdapat program penunjang untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Renstra, yaitu “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”.

Dari strategi dan arah kebijakan diatas, Penentuan indikator dari masing – masing program utama dan program penunjang dalam mendukung pencapaian indikator sasaran diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Dinas**  
**Sosial Kota Semarang**

<b>Sasaran</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan</b>
1, Menurunnya Angka Kemiskinan		
2, Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota
	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS
3, Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD
	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD

## B. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

**Tabel 2.4**  
**Perencanaan Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang**

No	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat				Persentase Penduduk Miskin	%	15
		1.1	Menurunnya Angka Kemiskinan	1.1.1	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	%	0,3
2.	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	100
		2.1	Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.1.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	99,81
				2.1.2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
				2.1.3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100
				2.1.4	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	%	78
				2.1.5	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial	%	69,85
3.	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas				Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel	%	100
		3.1	Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	3.1.1	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	%	100

#### 1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator *input* dan *output*. Sedangkan indikator kinerja program diukur dengan indikator hasil (*outcome*) yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja utama atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Dinas Sosial Kota Semarang telah merumuskan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Renstra Dinas Sosial Kota Semarang sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	0,3%
2.	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%
		Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	99,87%

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Semarang lainnya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai alat evaluasi ketercapaian standar pelayanan minimal yang diberikan oleh Dinas Sosial sudah baik, karena standar pelayanan minimal Dinas Sosial merupakan agregat dari mutu pelayanan Dinas Sosial itu sendiri.

**Tabel 2.6**  
**Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						Anggaran (Rp.)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	Setiap Tahun	1) Jumlah barang jasa dan Sumber Daya Manusia 2) Jumlah dan kualitas Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau Relawan Sosial	100%	Setiap Tahun	1.111.351.252
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	Setiap Tahun				
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	Setiap Tahun				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						Anggaran (Rp.)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	Setiap Tahun				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase (%) Korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Setiap Tahun	1) Jumlah dan kualitas barang dan jasa 2) Jumlah dan kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau Relawan Sosial	100%	Setiap Tahun	308.507.207

## 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan. Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	0.3%
2	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%
		Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	99.81%
3	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	71,41%

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Untuk mengetahui seberapa besar penyelesaian permasalahan utama atau isu strategis pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA) dan dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023, maka dilakukan pengukuran terhadap target kinerja sebagaimana telah diperjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disetujui atau ditandatangani pada awal tahun 2023. Pada BAB III ini akan dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama sebagai gambaran kinerja organisasi dan indikator kinerja sasaran dan target yang telah ditentukan ditahun 2023.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial merupakan perwujudan kewajiban Dinas Sosial Kota Semarang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) melalui media berupa formulir Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD. Pengukuran kinerja mencakup 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) SKPD yang merupakan Tingkat pencapaian sasaran dari masing - masing indicator sasaran yang telah ditetapkan.
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang merupakan Tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Rumus untuk mencari Presentase dalam Pengukuran Kinerja:

1. Untuk mengukur semakin tinggi realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik;

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk mengukur semakin tinggi realisasi, menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja;

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan dilakukan pengukuran keberhasilan setiap indikator. Perhitungan tingkat capaian dilakukan menggunakan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran program digolongkan menjadi 4 (empat) skala pengukuran, dengan kategori sebagai berikut:

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Pada tahun anggaran 2023, Dinas Sosial Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program / kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Sosial Kota Semarang memiliki 3 Tujuan yaitu **Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat** (Indikator : Angka Kemiskinan) dengan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan (Indikator : Menurunnya Angka DTKS (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH)), Tujuan **Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** (Indikator : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani) dengan sasaran Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (dengan 5 indikator), dan Tujuan **Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas** (Indikator : Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel) dengan sasaran Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel (indikator : Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel), dengan realisasi sebagai berikut :

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No.	Tujuan/Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Angka Kemiskinan	4,30	4,23	101,63	Sangat Baik
1.1	Menurunnya Angka Kemiskinan	1.1.1	Menurunnya Angka DTKS (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH)	15	9,68	135,47	Sangat Baik
2.	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	100	100,19	Sangat Baik
2.1	Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.1.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	100	100,19	Sangat Baik

No.	Tujuan/Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
		2.1.2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	Baik
		2.1.3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	Baik
		2.1.4	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	78	100	128	Sangat Baik
		2.1.5	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial	69,85	97,5	139,58	Sangat Baik
3.	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas		Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel	100	100	100	Baik
3.1	Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	3.1.1	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	100	100	100	Baik

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun ini dapat dilihat di tabel 3.1 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pada Tujuan 1 *Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat* dengan indikator kinerja *Angka Kemiskinan* terealisasi sebesar 4,23% dari target 4,30% dengan tingkat capaian sebesar 101,63% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **“SANGAT BAIK”**. Untuk tujuan 1 Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator *Angka Kemiskinan*, angka ini didapat dari hasil data yang dikeluarkan oleh BPS.
- b. Pada Sasaran 1.1 *Menurunnya Angka Kemiskinan* dengan indikator kinerja 1.1.1 *Menurunnya Angka DTKS* terealisasi sebesar 9,68% dari target 15% dengan tingkat capaian sebesar 135,47% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **“SANGAT BAIK”**.  
(Untuk Tujuan 1 dan Sasaran 1.1 menggunakan RUMUS PENGUKURAN KINERJA : **Semakin tinggi realisasi, menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja**).
- c. Pada Tujuan 2 *Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dengan indikator kinerja *Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani*

- terrealisasi sebesar 100% dari target 99,81% dengan tingkat capaian sebesar 100,19% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **“SANGAT BAIK”**.
- d. Pada Sasaran 2.1 *Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dengan indikator kinerja 2.1.1 *Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani* terrealisasi sebesar 100% dari target 99,81% dengan tingkat capaian sebesar 100,19% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **“SANGAT BAIK”**.
- e. Pada Sasaran 2.1 *Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dengan indikator kinerja 2.1.2 *Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* terrealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan tingkat capaian sebesar 100% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **“BAIK”**.
- f. Pada Sasaran 2.1 *Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dengan indikator kinerja 2.1.3 *Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota* terrealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan tingkat capaian sebesar 100% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **“BAIK”**.
- g. Pada Sasaran 2.1 *Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dengan indikator kinerja 2.1.4 *Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi* terrealisasi sebesar 100% dari target 78% dengan tingkat capaian sebesar 128% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **“SANGAT BAIK”**.
- h. Pada Sasaran 2.1 *Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dengan indikator kinerja 2.1.5 *Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial* terrealisasi sebesar 97,5% dari target 69,85% dengan tingkat capaian sebesar 139,58% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **“SANGAT BAIK”**.
- i. Pada Tujuan 3 *Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas* dengan indikator kinerja *Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel* terrealisasi sebesar 100% dari

target 100% dengan tingkat capaian sebesar 100% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **“BAIK”**.

- j. Pada Sasaran 3.1 *Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel* dengan indikator kinerja 3.1.1 *Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel* terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan tingkat capaian sebesar 100% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **“BAIK”**.

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka hasil capaian kinerja akan terlihat seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun - tahun sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya Angka kemiskinan	Menurunnya Angka DTKS (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH)	16,45%	24,23%	52,71%	16,10%	11,06%	131,3%	15%	9,68%	135,47%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	98%	100%	102,04%	99,75%	100%	100,25%	99,81%	100%	100,19%
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	91,60%	71,42%	77,97%	66,67%	100%	150%	78%	100%	128%

Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	16.200 orang	168.505 orang	1.040,15%	69,15%	80,34%	116,18%	69,85%	97,5%	139,58%
Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel 3.2 dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada sasaran pertama **Menurunnya Angka Kemiskinan** realisasi tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Kementerian/Lembaga terkait tentang angka DTKS pada tahun 2021, penentuan angka DTKS Tahun 2021 adalah angka kesejahteraan sosial yang meliputi :

- a. 6 metode pemutakhiran data kemiskinan :
  - 1) Usulan daerah
  - 2) Fitur usul sanggah aplikasi cek bansos
  - 3) Data bencana
  - 4) Hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media
  - 5) Hasil verifikasi pejuang muda
  - 6) Hasil geo tagging data spasial dari citra satelit
- b. Bantuan dari Kementerian/ Lembaga lain.

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil menurunkan Angka DTKS (Angka Kemiskinan berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH) dari yang ditargetkan 15% turun menjadi 9,68%, atau berhasil mencapai target 135,47%. Hal ini menurun dibandingkan capaian Tahun 2022 sebesar 11,06%.

Selanjutnya pada indikator Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial pada tahun 2023 berhasil meningkat dari yang ditargetkan 69,85% mencapai 97,5%, atau berhasil mencapai target 139,58%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 80,34%.

Dari keberhasilan pencapaian target kinerja diatas bermanfaat bagi warga Fakir Miskin di Kota Semarang untuk mendapatkan Bantuan Sosial yang bersumber dari Pusat maupun Daerah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi salah sasaran.

### 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD dapat dilihat dari table berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Angka Kemiskinan	4,23	101,63	4,15	98.07	Akan Tercapai
1.1	Menurunnya Angka kemiskinan	1.1.1	Menurunnya Angka DTKS (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH)	9,68	135,47	14,90	135,03	Tercapai
2.	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100	100,19	100	100	Tercapai
2.1	Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.1.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100	100,19	100	100	Tercapai
		2.1.2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	Tercapai
		2.1.3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	Tercapai
		2.1.4	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	100	128	100	100	Tercapai
		2.1.5	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial	97,5	139,58	71,96	135,49	Tercapai
3.	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas		Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel	100	100	100	100	Tercapai
3.1	Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	3.1.1	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	100	100	100	100	Tercapai

Dari tabel diatas dapat dilihat pada indikator **Angka Kemiskinan** dengan tujuan **Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat**

untuk tahun berikutnya masih perlu dikaji ulang dan dikejar kekurangan-kekurangannya agar pada target akhir tahun 2026 realisasi yang dicapai dapat sesuai target atau melebihi target akhir RPJMD.

Sedangkan pada indikator lainnya menunjukkan capaian pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang sudah sesuai dan melebihi target akhir RPJMD.

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang yang termasuk dalam standar nasional adalah indikator kinerja program kegiatan yang realisasi dan capaiannya dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
Perbandingan target dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis Dinsos Kota Semarang Tahun 2023 dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Target		Capaian
		Dinsos Kota Semarang	Nasional	Dinas Sosial Kota Semarang
1	2	3	4	5
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	100%	100%
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	100%	100%
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	100%	100%
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	100%	100%
5	Persentase (%) Korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%

#### 5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5**  
Analisa Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	%
1	Angka Kemiskinan	4,30%	4,23%	101,63%
2	Menurunnya Angka DTKS (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH)	15%	9,68%	135,47%
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19%
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat	100%	100%	100%

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023		
	dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
6	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	78%	100%	128%
7	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial	69,85%	97,5%	139,58%
8	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja **Angka Kemiskinan** pada tahun 2023 menjadi sebesar 4,23% dari yang ditargetkan 4,30%. Hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 4,25% sesuai dari Data BPS Kota Semarang. Adapun hasil verifikasi validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk warga miskin Kota Semarang pada Tahun 2023 untuk indikator kinerja Menurunnya Angka Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH) mengalami **penurunan** menjadi sebesar 9,68% dari yang ditargetkan 15%, hal ini memenuhi target yang telah ditentukan. Serta mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 11,06%.

Untuk capaian indikator kinerja **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani meningkat** menjadi sebesar 100% dari yang ditargetkan 99,81%, hal ini sama jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 100%, sedangkan untuk indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti capaian target sama dengan tahun 2022 sebesar 100%, untuk indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota capaian target juga sama dengan tahun 2022 yaitu 100%.

Untuk Capaian indikator kinerja **Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi** mengalami kenaikan sebanyak 100% dari target 78%, hal ini **meningkat** dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 83,33%, sedangkan indikator kinerja Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan sebesar 97,5% dari target 69,85%, bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 80,34% sehingga mengalami **kenaikan**. Untuk indikator kinerja Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2022 sebesar 100%.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa **keberhasilan** Dinas Sosial Kota Semarang dalam **melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** yang telah ditetapkan membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di

Kota Semarang melalui pelaksanaan **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Fasilitasi pemberian Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat maupun Daerah kepada Fakir Miskin, Penanganan dan Pemberian Bantuan kepada Korban Bencana Alam dan Sosial pada saat maupun setelah tanggap darurat bencana di Kota Semarang.**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa **faktor** yang menjadi **penghambat** ketercapaian kinerja Dinas Sosial Kota Semarang, antara lain:

- a. Penetapan sasaran penerima layanan dasar Tahun 2023 belum berdasarkan pendataan tetapi masih menggunakan estimasi berdasarkan pelayanan yang dilaksanakan dinas tahun sebelumnya.
- b. Belum/kurang pahami sumber daya manusia pada bidang pengampu kegiatan pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial.
- c. Kurangnya kompetensi SDM dibidang pengawasan teknologi informasi. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan digitalisasi dokumen-dokumen sehingga meminimalisir kerusakan atau kehilangan dokumen fisik.
- d. Keterbatasan sarana penunjang pelaksanaan pelayanan publik.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai prosedur pelayanan publik.

Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja juga terdapat **faktor pendorong**, yaitu:

- a. Sudah adanya uji kompetensi sertifikasi SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan dalam penanganan PPKS;
- b. Adanya rumah singgah/UPTD/shelter yang dimiliki Dinas Sosial Kota Semarang untuk menampung penerima layanan dasar yang terjaring tim penjangkauan Dinas Sosial.

Adapun **alternative solusi** yang dapat dilakukan adalah antara lain:

- a. Penerima layanan dasar diberikan kepada kelayan yang ditangani di UPTD/Shelter hasil laporan dari call center 112 Kota Semarang, laporan dari warga secara langsung ke Dinas Sosial dan data yang diperoleh pada pendataan bulan Juni 2023;
- b. Adanya dukungan OPD kepada SDM pengampu agar lebih memahami kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dengan diikutkan

dalam segala kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan OPD teknis terkait;

- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- d. Sosialisasi mengenai prosedur pelayanan kepada Masyarakat.

#### 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara capaian tujuan dan sasaran dengan realisasi anggaran. Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya (berupa anggaran) terhadap pencapaian sasaran tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	4,30	4,23	101,63	928.158.506	888.718.855	95,75	4,25
1.1	Menurunnya Angka kemiskinan	15	9,68	135,47				
2.	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	99,81	100	100,19	23.496.659.472	19.952.520.622	84,92	15,08
2.1	Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	99,81	100	100,19				
3.	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas	100	100	100	8.800.088.797	8.571.325.131	97,40	2,60
3.1	Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	100	100	100				

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2023 terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (dalam hal ini berupa anggaran) atas setiap pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang. Penjelasan Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya adalah sebagai berikut:

Pada Tujuan 1 dan Sasaran 1.1 didukung dengan 1 (satu) program yaitu **Program** Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 1 (satu) kegiatan yaitu **Kegiatan** Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran total sebesar Rp. 928.158.506,00 dan realisasi sebesar

Rp. 888.718.855,00 dengan capaian keuangan sebesar 95,75% dan didapat efisiensi sebesar 4,25%.

Pada Tujuan 2 dan Sasaran 2.1 didukung dengan 5 (lima) program yaitu **Program** Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu **Kegiatan** Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan 1 (satu) Sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, **Program** Rehabilitasi Sosial dengan 2 (dua) kegiatan yaitu **Kegiatan** Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan 12 (dua belas) sub kegiatan (terlampir), **Kegiatan** Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan 14 (empat belas) sub kegiatan (terlampir). **Program** Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 2 (dua) kegiatan yaitu **Kegiatan** Pemeliharaan Anak-anak Terlantar dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar, Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar, dan Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar, **Kegiatan** Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. **Program** Penanganan Bencana dengan 2 (dua) kegiatan yaitu **Kegiatan** Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Penyediaan Makanan, Sub kegiatan Penyediaan Sandang, Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, dan Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial. **Kegiatan** Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana, dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. **Program** Pemberdayaan Sosial dengan 1 (satu) kegiatan yaitu **Kegiatan** Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan anggaran total sebesar Rp. 23.496.659.472,00 dan realisasi sebesar Rp. 19.952.520.622,00 dengan capaian keuangan sebesar 84,92% dan didapat efisiensi sebesar 15,08%.

Pada Tujuan 3 dan sasaran 3.1 didukung dengan 1 (satu) program yaitu **Program** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu **Kegiatan** Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 7 (tujuh) sub kegiatan (terlampir). **Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 6 (enam) sub kegiatan (terlampir). **Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 9 (Sembilan) sub kegiatan (terlampir) dengan anggaran total sebesar Rp. 8.800.088.797,00 dan realisasi sebesar Rp. 8.571.325.131,00 dengan capaian keuangan sebesar 97,40% dan didapat efisiensi sebesar 2,60%.

Efisiensi pada tujuan dan sasaran diatas disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Adanya penghematan belanja pengadaan barang dimana harga pasar atas barang lebih rendah dari Standar Harga Satuan (SHS);
2. Adanya perubahan struktur kepegawaian (mutasi keluar);
3. Adanya penghematan belanja makan dan minum rapat;
4. Berkurangnya jumlah penerima bantuan sosial bagi buruh rokok dari DBHCHT.
5. Berkurangnya jumlah penerima layanan kedaruratan.

#### **7. Analisis Program/Kegiatan Tahun 2023 yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Analisis Program/Kegiatan Tahun 2023 yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	101,63				
1.1	Menurunnya Angka kemiskinan	Menurunnya Angka DTKS (berdasarkan	135,47				

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
		kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH)					
				<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	100	
2.	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100,19				
2.1	Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100,19				
				<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100	
				<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang	Persentase Penyandang Masalah	100	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial		
				<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial</b>	100	<b>Menunjang</b>
				Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100	
				<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani</b>	100	<b>Menunjang</b>
				Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100				
				<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani</b>	100	<b>Menunjang</b>
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada	100				

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
		saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota					
				<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	
				Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100	
		Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	128				
				<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100	
		Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	139,58				
				<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial</b>	100	<b>Menunjang</b>
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	100	
				<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani</b>	100	<b>Menunjang</b>
				Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	
3.	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas	Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel	100				
3.1	Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	100				
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial</b>	100	<b>Menunjang</b>
					<b>Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial</b>		
					<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial</b>		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan berhasil menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Semarang.

Untuk tujuan **Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat** dengan sasaran **Menurunnya Angka Kemiskinan** dengan indikator kinerja sasaran **Menurunnya Angka DTKS**, pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil menurunkan Angka DTKS (Angka Kemiskinan berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH) yang ditunjang 1 (satu) program yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai melalui **Kegiatan/Sub Kegiatan** yang telah dilaksanakan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (100%), Sub Kegiatan Verifikasi dan Validasi Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota (100%), Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga serta Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, yang didalamnya terdapat kegiatan prioritas OPD yaitu Bantuan Santunan Kematian bagi Warga Fakir Miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tercatat pada Data Penerima PKH dan Penerima BSP, untuk capaian tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Indikator Kinerja dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	%
1	Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang	1 kegiatan	4 kegiatan	400%
2	Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
3	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1.500 Keluarga	4.917 Keluarga	328%
4	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000 Keluarga	70.439 Keluarga	141%

Untuk tujuan **Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dengan sasaran **Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dengan indikator kinerja sasaran **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani** ditunjang dengan 4 (empat) program yaitu:

- a. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani dari yang ditargetkan 100% mencapai 100%, atau

berhasil mencapai target 100%. Hal ini dalam pencapaian target pada tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Dari keberhasilan pencapaian target kinerja diatas bermanfaat bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani dari Kota Semarang dengan pemberian fasilitas untuk pemulangannya ke daerah asal. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain melalui **Kegiatan/Sub Kegiatan** yang telah dilaksanakan, yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, pada Tahun 2023 terdapat 6 orang Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang berasal dari Kota Semarang yang sudah berhasil dipulangkan ke daerah asal.

- b. Program Rehabilitasi Sosial kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari yang ditargetkan 99,81% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 100,19%, serta Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, dari yang ditargetkan 100% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 100%. Hal ini dalam pencapaian target pada tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Dari keberhasilan pencapaian target kinerja diatas bermanfaat bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis terpenuhi kebutuhan dasarnya. Demikian juga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dasar sesuai kebutuhannya. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain melalui **Kegiatan/Sub Kegiatan** yang telah dilaksanakan, yaitu:

- (1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang merupakan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang harus memenuhi target 100% dalam pelaksanaannya.
- (2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang merupakan yang didalamnya terdapat kegiatan prioritas Kota Semarang yaitu Bantuan perma kanan Jumat Berkah bagi warga Kota Semarang yang kurang mampu dalam

memenuhi kebutuhan dasarnya serta pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas.

- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan **kegiatan** Pemeliharaan Anak-anak Terlantar dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung **sub kegiatan** Penjangkauan Anak-Anak Terlantar (100%), **sub kegiatan** Rujukan Anak-Anak Terlantar (100%) dan **sub kegiatan** Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar (100%). Dari keberhasilan pencapaian target kinerja diatas bermanfaat bagi anak terlantar terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Program keempat Penanganan Bencana kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani dari yang ditargetkan 100% mencapai 100% atau berhasil mencapai target 100%. Hal ini dalam pencapaian target pada tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Dari keberhasilan pencapaian target kinerja diatas bermanfaat bagi korban bencana alam dan bencana sosial yang ada di Kota Semarang dengan terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai melalui, **Kegiatan/Sub Kegiatan** yang telah dilaksanakan, yaitu:
  - (1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Pelayanan Dukungan Psikososial.
  - (2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

untuk capaian diatas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Indikator Kinerja dalam Program Penanganan Bencana Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan / makanan siap saji	373 orang	588 orang	158%
2	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids	373 orang	397 orang	106%
3	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	5 unit	3 unit	60%
4	Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu	75 orang	76 orang	101%

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	%
	hamil, Penyandang Disabilitas dan Anak)			
5	Jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	11 orang	56 orang	509%
6	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Alam dan Sosial	1 kegiatan	3 kegiatan	300%
7	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	2 kegiatan	7 kegiatan	350%

Untuk tujuan **Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dengan sasaran **Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dengan indikator kinerja sasaran **Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi** ditunjang dengan 1 (satu) program Pemberdayaan Sosial, pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi dari yang ditargetkan 78% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 128%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 83,33%. Dari keberhasilan pencapaian target kinerja diatas karena terfasilitasinya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota Semarang sehingga dapat menunjukkan peranannya pada pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) semakin meningkat sesuai dengan harapan. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai melalui **Kegiatan/Sub Kegiatan** yang telah dilaksanakan, yaitu:

- (1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yaitu kegiatan yang memfasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota Semarang sangat membantu dalam pelaksanaan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kota Semarang, sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.
- (2) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota serta Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Indikator Kinerja dalam Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	%
1	Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	Terfasilitasi dan berdayanya PSM	1 kegiatan	3 kegiatan	300%
	Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	100%	100%	100%
	Terpenuhinya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat	177 Orang	260 Orang	147%
	Jumlah Orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan kabupaten/Kota	260 Orang	260 Orang	100%
3	Terpenuhinya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16 Orang	16 Orang	100%
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	100%
4	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH))	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	4 Keluarga	100%
5	Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	6 kegiatan	6 kegiatan	100%
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	5 Lembaga	100%
6	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Sertifikat	10 Sertifikat	111%

## B. REALISASI ANGGARAN

Penggunaan atau realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023**

(NAMA OPD)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
<b>URUSAN WAJIB SOSIAL</b>			
OPD DINAS SOSIAL	35.272.253.286	31.385.954.802	88,98%
<b>JUMLAH</b>	<b>35.272.253.286</b>	<b>31.385.954.802</b>	<b>88,98%</b>

**Tabel 3.12**  
**Rincian Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023**

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.737.798.025	10.450.397.565	97,32%
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	4.257.260	4.248.550	99,80%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	<b>Perangkat Daerah</b>			
01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	487.800	482.000	98,81%
01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	253.600	253.550	99,98%
01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	355.890	355.750	99,96%
01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	253.600	253.500	99,96%
01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	355.890	354.750	99,68%
01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.933.200	1.932.000	99,94%
01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	617.280	617.000	99,95%
<b>2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.230.346.015</b>	<b>8.042.274.441</b>	<b>97,71%</b>
02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.901.815.875	7.726.054.591	97,78%
02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324.643.200	312.348.550	96,21%
02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	253.600	248.800	98,11%
02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	263.980	253.300	95,95%
02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.167.760	3.167.700	100,00%
02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	201.500	99,95%
<b>2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>565.485.522</b>	<b>524.802.140</b>	<b>92,81%</b>
06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.804.370	90,22%
06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0,00%
06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000	12.999.040	99,99%
06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.339.950	13.291.950	99,64%
06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.369.712	15.298.500	99,54%
06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	5.040.000	100,00%
06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.275.000	51.595.000	73,42%
06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.598.589	221.366.380	98,56%
06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	221.862.271	203.406.900	91,68%
<b>2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>226.286.513</b>	<b>220.190.050</b>	<b>97,31%</b>
07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	197.073.443	194.460.250	98,67%
07.10	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	29.213.070	25.729.800	88,08%
<b>2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>126.292.784</b>	<b>114.858.867</b>	<b>90,95%</b>
08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.292.784	114.858.867	90,95%
<b>2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.434.311.531</b>	<b>1.398.580.093</b>	<b>97,51%</b>
09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	28.099.500	69,70%
09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	579.269.724	573.096.700	98,93%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perikinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			
09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	3.636.000	3.635.250	99,98%
09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	491.336.000	487.481.557	99,22%
09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.658.822	200.956.636	94,50%
09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	107.097.805	105.310.450	98,33%
<b>2.13</b>	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>150.818.400</b>	<b>145.443.424</b>	<b>96,44%</b>
13.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	150.818.400	145.443.424	96,44%
<b>02</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>7.651.690.831</b>	<b>7.284.645.019</b>	<b>95,20%</b>
<b>2.02</b>	<b>Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>109.637.283</b>	<b>94.317.760</b>	<b>86,03%</b>
02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	109.637.283	94.317.760	86,03%
<b>2.03</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.542.053.548</b>	<b>7.190.327.259</b>	<b>95,34%</b>
03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.373.737.338	5.244.887.710	97,60%
03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	356.756.379	348.291.620	97,63%
03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	210.296.720	181.859.800	86,48%
03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	680.756.451	607.154.349	89,19%
03.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	920.506.660	808.133.780	87,79%
<b>03</b>	<b>Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>45.413.532</b>	<b>30.659.070</b>	<b>67,51%</b>
<b>2.01</b>	<b>Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>45.413.532</b>	<b>30.659.070</b>	<b>67,51%</b>
01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	45.413.532	30.659.070	67,51%
<b>04</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>9.447.861.272</b>	<b>8.222.571.255</b>	<b>87,03%</b>
<b>2.01</b>	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>2.290.609.104</b>	<b>2.233.314.156</b>	<b>97,50%</b>
01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	960.700.000	959.940.000	99,92%
01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	10.705.000	10.678.250	99,75%
01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	804.100	750.000	93,27%
01.04	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	33.000.000	32.171.000	97,49%
01.05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	752.408.140	735.939.633	97,81%
01.06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	94.422.500	94.185.000	99,75%
01.07	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu	8.045.000	7.375.000	91,67%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Identitas Anak			
01.08	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.702.720	1.694.820	99,54%
01.09	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	297.974.000	276.892.953	92,93%
01.10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	57.847.644	41.445.000	71,65%
01.11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.250.000	24.931.500	98,74%
01.12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	47.750.000	47.311.000	99,08%
<b>2.02</b>	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>7.157.252.168</b>	<b>5.989.257.099</b>	<b>83,68%</b>
02.01	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	478.890.800	475.455.604	99,28%
02.02	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	78.100.000	43.878.500	56,18%
02.03	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	5.535.024.450	4.447.841.764	80,36%
02.04	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	20.315.000	19.500.000	95,99%
02.05	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu			
02.06	Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	69.816.400	69.639.631	99,75%
02.07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	147.720.100	147.635.500	99,94%
02.08	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	129.851.000	126.350.000	97,30%
02.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	48.764.452	46.745.000	95,86%
02.10	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	55.517.000	49.872.000	89,83%
02.11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.250.000	5.250.000	100,00%
02.12	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.250.000	5.250.000	100,00%
02.13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	15.900.000	15.435.000	97,08%
02.14	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	566.852.966	536.404.100	94,63%
<b>05</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>6.357.803.540</b>	<b>4.410.933.488</b>	<b>69,38%</b>
<b>2.01</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>242.292.360</b>	<b>198.899.620</b>	<b>82,09%</b>
01.01	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	166.682.730	151.869.540	91,11%
01.02	Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	52.763.770	36.142.360	68,50%
01.03	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	22.845.860	10.887.720	47,66%
<b>2.02</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.115.511.180</b>	<b>4.212.033.868</b>	<b>68,87%</b>
02.01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	449.985.170	444.220.800	98,72%
02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	478.173.336	444.498.055	92,96%
02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.808.996.430	2.964.471.118	61,64%
02.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	378.356.244	358.843.895	94,84%
<b>06</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>1.031.686.086</b>	<b>986.748.405</b>	<b>95,64%</b>
<b>2.01</b>	<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban</b>	<b>597.656.036</b>	<b>560.759.106</b>	<b>93,83%</b>

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	<b>Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			
01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	196.849.660	178.547.191	90,70%
01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	70.860.000	68.503.280	96,67%
01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	41.970.000	40.856.375	97,35%
01.04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	64.414.450	58.884.310	91,41%
01.05	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	223.561.926	213.967.950	95,71%
<b>2.02</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>434.030.050</b>	<b>425.989.299</b>	<b>98,15%</b>
02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	245.565.636	242.677.450	98,82%
02.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	188.464.414	183.311.849	97,27%

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, disamping juga merupakan alat kendali atau penilai kualitas kerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2023 didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan Umum**

Evaluasi terhadap beberapa kegiatan dan indikator yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan terkait, disamping juga bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja yang telah dibuat, telah dilakukan pengukuran evaluasi dengan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis dalam indikator utama Dinas Sosial Kota Semarang tahun 2023 terdapat 3 (tiga) tujuan dengan capaian SANGAT BAIK, dengan rata-rata capaian sebesar 100,60%; 3 (tiga) sasaran dengan capaian SANGAT BAIK, dengan rata-rata capaian sebesar 114,75%, 6 (enam) program dengan capaian BAIK, dengan rata-rata capaian sebesar 100%, 16 (enam belas) kegiatan dengan capaian BAIK, dengan rata-rata capaian sebesar 100%.
2. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, realisasi sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dengan indikator Menurunnya Angka DTKS (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH) adalah sebesar 135,47%, sementara target akhir 2026 sebesar 4,15% sehingga capaian tahun 2023 sudah melampaui target akhir RPJMD. Sedangkan sasaran Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani capaiannya adalah 100,19%, sementara target akhir tahun 2026 sebesar 100% sehingga capaian tahun 2023 sudah melampaui target akhir RPJMD. Kemudian indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti persentase capaiannya adalah 100% sedangkan target tahun 2026 adalah 100% sehingga capaian tahun 2023 sudah sesuai target akhir RPJMD. Untuk indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota nilai capaiannya adalah 100% dan target akhir tahun 2026 sebesar 100% sehingga capaian untuk tahun 2023 untuk indikator ini sudah mencapai target akhir RPJMD. Indikator Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi realisasi capaiannya 128% sedangkan capaian akhir tahun 2026 adalah 100% sehingga cakupan 2023 untuk indikator ini sudah melampaui target akhir RPJMD; dan untuk indikator Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial capaiannya adalah 139,58% dengan target akhir tahun sebesar 71,96 sehingga capaian tahun 2023 sudah melampaui target akhir RPJMD. Dan untuk sasaran Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel nilai capaiannya adalah sebesar 100% dengan target akhir tahun RPJMD adalah sebesar 100% sehingga capaian tahun 2023 ini sudah sesuai dengan target akhir RPJMD.

3. Persentase capaian kinerja keuangan untuk Dinas Sosial Kota Semarang adalah 88,98% dengan realisasi sebesar Rp. 31.385.954.802,00 dari target anggaran sebesar Rp. 35.272.253.286,00.

## **B. Rekomendasi**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota Semarang, upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan banyak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian dengan memberikan pelatihan baik inhouse training atau pelatihan dalam daerah maupun luar daerah.
4. Mengadakan sosialisasi mengenai prosedur pelayanan publik kepada Masyarakat.

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam menilai kinerja Dinas Sosial Kota Semarang serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Dinas Sosial Kota Semarang untuk memenuhi tujuan Dinas Sosial yaitu Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Semarang, 15 Februari 2024



**LAMPIRAN 1****PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
TAHUN 2023**

DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>PROSENTASE (%)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya Angka DTKS	15	9.68	135,47	
<b>Rata-rata capaian sasaran 1</b>					<b>135,47</b>	
2.	Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	100	100,19	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	
		Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	78	100	128	
		Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial	69,85	97,5	139,58	
<b>Rata-rata capaian sasaran 2</b>					<b>113,6</b>	
3.	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	100	100	100	
<b>Rata-rata capaian sasaran 3</b>					<b>100</b>	

**LAMPIRAN 2**

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA  
TAHUN 2023**

DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

<b>NO</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>SELISIH (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>A</b>	<b>Belanja Operasi dan Belanja Modal</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.737.798.025</b>	<b>10.450.397.565</b>	<b>287.400.460</b>	<b>97,32%</b>
		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.257.260</b>	<b>4.248.550</b>	<b>8.710</b>	<b>99,80%</b>
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	487.800	482.000	5.800	98,81%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	253.600	253.550	50	99,98%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	355.890	355.750	140	99,96%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	253.600	253.500	100	99,96%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	355.890	354.750	1.140	99,68%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.933.200	1.932.000	1.200	99,94%
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	617.280	617.000	280	99,95%
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.230.346.015</b>	<b>8.042.274.441</b>	<b>188.071.574</b>	<b>97,71%</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.901.815.875	7.726.054.591	175.761.284	97,78%

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324.643.200	312.348.550	12.294.650	96,21%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	253.600	248.800	4.800	98,11%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	263.980	253.300	10.680	95,95%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.167.760	3.167.700	60	100,00%
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	201.500	100	99,95%
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>565.485.522</b>	<b>524.802.140</b>	<b>40.683.382</b>	<b>92,81%</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.804.370	195.630	90,22%
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0,00%
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000	12.999.040	960	99,99%
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.339.950	13.291.950	48.000	99,64%
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.369.712	15.298.500	71.212	99,54%
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	5.040.000	0	100,00%
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	70.275.000	51.595.000	18.680.000	73,42%
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.598.589	221.366.380	3.232.209	98,56%
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	221.862.271	203.406.900	18.455.371	91,68%

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>226.286.513</b>	<b>220.190.050</b>	<b>6.096.463</b>	<b>97,31%</b>
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	197.073.443	194.460.250	2.613.193	98,67%
		Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	29.213.070	25.729.800	3.483.270	88,08%
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>126.292.784</b>	<b>114.858.867</b>	<b>11.433.917</b>	<b>90,95%</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.292.784	114.858.867	11.433.917	90,95%
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.434.311.531</b>	<b>1.398.580.093</b>	<b>35.731.438</b>	<b>97,51%</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	28.099.500	12.213.680	69,70%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perikinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	579.269.724	573.096.700	6.173.024	98,93%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	3.636.000	3.635.250	750	99,98%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan atau rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	491.336.000	487.481.557	3.854.443	99,22%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.658.822	200.956.636	11.702.186	94,50%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	107.097.805	105.310.450	1.787.355	98,33%
		<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>150.818.400</b>	<b>145.443.424</b>	<b>5.374.976</b>	<b>96,44%</b>

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
		Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	150.818.400	145.443.424	5.374.976	96,44%
		<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>7.651.690.831</b>	<b>7.284.645.019</b>	<b>367.045.812</b>	<b>95,20%</b>
		<b>Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>109.637.283</b>	<b>94.317.760</b>	<b>15.319.523</b>	<b>86,03%</b>
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	109.637.283	94.317.760	15.319.523	86,03%
		<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.542.053.548</b>	<b>7.190.327.259</b>	<b>351.726.289</b>	<b>95,34%</b>
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.373.737.338	5.244.887.710	128.849.628	97,60%
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	356.756.379	348.291.620	8.464.759	97,63%
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	210.296.720	181.859.800	28.436.920	86,48%
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	680.756.451	607.154.349	73.602.102	89,19%
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	920.506.660	808.133.780	112.372.880	87,79%
		<b>Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>45.413.532</b>	<b>30.659.070</b>	<b>14.754.462</b>	<b>67,51%</b>
		<b>Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>45.413.532</b>	<b>30.659.070</b>	<b>14.754.462</b>	<b>67,51%</b>

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	45.413.532	30.659.070	14.754.462	67,51%
		<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>9.447.861.272</b>	<b>8.222.571.255</b>	<b>1.225.290.017</b>	<b>87,03%</b>
		<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>2.290.609.104</b>	<b>2.233.314.156</b>	<b>57.294.948</b>	<b>97,50%</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	960.700.000	959.940.000	760.000	99,92%
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	10.705.000	10.678.250	26.750	99,75%
		Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	804.100	750.000	54.100	93,27%
		Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	33.000.000	32.171.000	829.000	97,49%
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	752.408.140	735.939.633	16.468.507	97,81%
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	94.422.500	94.185.000	237.500	99,75%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	8.045.000	7.375.000	670.000	91,67%
		Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.702.720	1.694.820	7.900	99,54%
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	297.974.000	276.892.953	21.081.047	92,93%
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	57.847.644	41.445.000	16.402.644	71,65%

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
		Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.250.000	24.931.500	318.500	98,74%
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	47.750.000	47.311.000	439.000	99,08%
		<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>7.157.252.168</b>	<b>5.989.257.099</b>	<b>1.167.995.069</b>	<b>83,68%</b>
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	478.890.800	475.455.604	3.435.196	99,28%
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	78.100.000	43.878.500	34.221.500	56,18%
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	5.535.024.450	4.447.841.764	1.087.182.686	80,36%
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	20.315.000	19.500.000	815.000	95,99%
		Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu			0	
		Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	69.816.400	69.639.631	176.769	99,75%
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	147.720.100	147.635.500	84.600	99,94%
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	129.851.000	126.350.000	3.501.000	97,30%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	48.764.452	46.745.000	2.019.452	95,86%
		Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	55.517.000	49.872.000	5.645.000	89,83%
		Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.250.000	5.250.000	0	100,00%

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
		Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.250.000	5.250.000	0	100,00%
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	15.900.000	15.435.000	465.000	97,08%
		Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	566.852.966	536.404.100	30.448.866	94,63%
		<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>6.357.803.540</b>	<b>4.410.933.488</b>	<b>1.946.870.052</b>	<b>69,38%</b>
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>242.292.360</b>	<b>198.899.620</b>	<b>43.392.740</b>	<b>82,09%</b>
		Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	166.682.730	151.869.540	14.813.190	91,11%
		Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	52.763.770	36.142.360	16.621.410	68,50%
		Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	22.845.860	10.887.720	11.958.140	47,66%
		<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.115.511.180</b>	<b>4.212.033.868</b>	<b>1.903.477.312</b>	<b>68,87%</b>
		Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	449.985.170	444.220.800	5.764.370	98,72%
		Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	478.173.336	444.498.055	33.675.281	92,96%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.808.996.430	2.964.471.118	1.844.525.312	61,64%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	378.356.244	358.843.895	19.512.349	94,84%
		<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>1.031.686.086</b>	<b>986.748.405</b>	<b>44.937.681</b>	<b>95,64%</b>
		<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>597.656.036</b>	<b>560.759.106</b>	<b>36.896.930</b>	<b>93,83%</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	196.849.660	178.547.191	18.302.469	90,70%
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	70.860.000	68.503.280	2.356.720	96,67%

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
		Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	41.970.000	40.856.375	1.113.625	97,35%
		Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	64.414.450	58.884.310	5.530.140	91,41%
		Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	223.561.926	213.967.950	9.593.976	95,71%
		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>434.030.050</b>	<b>425.989.299</b>	<b>8.040.751</b>	<b>98,15%</b>
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	245.565.636	242.677.450	2.888.186	98,82%
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	188.464.414	183.311.849	5.152.565	97,27%
<b>Jumlah dan rata-rata %</b>			<b>35.272.253.286</b>	<b>31.385.954.802</b>	<b>3.886.298.484</b>	<b>88,98%</b>

## LAMPIRAN 3

PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2022

## DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	78,00%	100%	128	1.06.02	109.637.283	94.317.760	86,03%
					Program Pemberdayaan Sosial			
					1.06.02.2.02			
					Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
					1.06.02.2.02.01			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang								
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	78,00%	100%	128	1.06.02	5.373.737.338	5.244.887.710	97,60%
					Program Pemberdayaan Sosial			
					1.06.02.2.03			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
					1.06.02.2.03.01			
					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	78,00%	100%	128	1.06.02	356.756.379	348.291.620	97,63%
					Program Pemberdayaan Sosial			
					1.06.02.2.03			
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
					1.06.02.2.03.02			
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	78,00%	100%	128	1.06.02	210.296.720	181.859.800	86,48%
					Program Pemberdayaan Sosial			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					1.06.02.2.02			
					Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
					1.06.02.2.03.03			
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	78,00%	100%	128	1.06.02	680.756.451	607.154.349	89,19%
					Program Pemberdayaan Sosial			
					1.06.02.2.03			
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
					1.06.02.2.03.04			
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	78,00%	100%	128	1.06.02	920.506.660	808.133.780	87,79%
					Program Pemberdayaan Sosial			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					1.06.02.2.03			
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
					1.06.02.2.03.05			
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.03	45.413.532	30.659.070	67,51%
					Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			
					1.06.03.2.01			
					Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
					1.06.03.2.01.01			
					Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.04	960.700.000	959.940.000	99,92%
	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.01			
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.01.01			
Penyediaan Permakanan								
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	100%	100,19	1.06.04	10.705.000	10.678.250	99,75%
	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.01			
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.01.02			
Penyediaan Sandang								

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	100%	100,19	1.06.04	804.100	750.000	93,27%
	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.01			
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.01.03			
Penyediaan Alat Bantu								
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	100%	100,19	1.06.04	33.000.000	32.171.000	97,49%
	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.01			
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.01.04			
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	100%	100,19	1.06.04	752.408.140	735.939.633	97,81%
	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.01			
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.01.05			
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	100%	100,19	1.06.04	94.422.500	94.185.000	99,75%
	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.01			
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
1.06.04.2.01.06								

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%	
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	100%	100,19	1.06.04	8.045.000	7.375.000	91,67%	
	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100%	100%	100				Program Rehabilitasi Sosial
									1.06.04.2.01
									Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
									1.06.04.2.01.07
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak								

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	100%	100,19	1.06.04	1.702.720	1.694.820	99,54%
	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.01			
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.01.08			
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar								
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	100%	100,19	1.06.04	297.974.000	276.892.953	92,93%
	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.01			
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.01.09			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	100%	100,19	1.06.04	57.847.644	41.445.000	71,65%
	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.01			
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
1.06.04.2.01.10								
Pemberian Layanan Kedaruratan								
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	100%	100,19	1.06.04	25.250.000	24.931.500	98,74%
	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.01			
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
					1.06.04.2.01.11			
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	100%	100,19	1.06.04	47.750.000	47.311.000	99,08%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.01			
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.01.12			
					Pemberian Layanan Rujukan			
					1.06.04	478.890.800	475.455.604	99,28%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.02			
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.02.01			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.04	78.100.000	43.878.500	56,18%
					Program Rehabilitasi Sosial			
					1..06.04.2.02			
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.02.02			
					Pemberian Layanan Kedaruratan			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.04	5.535.024.450	4.447.841.764	80,36%
					Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.02			
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.02.03			
					Penyediaan Permakanan			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.04	20.315.000	19.500.000	95,99%
					Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.02			
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.02.04			
Penyediaan Sandang								
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.04	69.816.400	69.639.631	99,75%
					Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.02			
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.02.06			
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti								

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.04	147.720.100	147.635.500	99,94%
					Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.02			
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.02.07			
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.04	129.851.000	126.350.000	97,30%
					Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.02			
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.02.08			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.04	48.764.452	46.745.000	95,86%
					Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.02			
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.02.09			
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.04	55.517.000	49.872.000	89,83%
					Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.02			
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
					1.06.04.2.02.10			
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.04	5.250.000	5.250.000	100
					Program Rehabilitasi Sosial			
					1..06.04.2.02			
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.02.11			
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.04	5.250.000	5.250.000	100
					Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.02			
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.02.12			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.04	15.900.000	15.435.000	97,08%
					Program Rehabilitasi Sosial			
					1.06.04.2.02			
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.02.13			
Pemberian Layanan Rujukan								
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.04	566.852.966	536.404.100	94,63%
					Program Rehabilitasi Sosial			
					1..06.04.2.02			
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.02.14			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.05	166.682.730	151.869.540	91,11%
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
					1.06.05.2.01			
					Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			
					1.06.05.2.01.01			
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar								
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.05	52.763.770	36.142.360	68,50%
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
					1.06.05.2.01			
					Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			
					1.06.05.2.01.02			
Rujukan Anak-Anak Terlantar								

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	100%	100,19	1.06.05	22.845.860	10.887.720	47,66%
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
					1.06.05.2.01			
					Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			
					1.06.05.2.01.03			
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar								
Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya Angka DTKS	15%	9,68%	135,47	1.06.05	449.985.170	444.220.800	98,72%
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
					1.06.05.2.02			
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
					1.06.05.2.02.01			
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya Angka DTKS	15%	9,68%	135,47	1.06.05	478.173.336	444.498.055	92,96%
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
					1.06.05.2.02			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
					1.06.05.2.02.02			
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	69,85%	97,50%	139,58	1.06.05	4.808.996.430	2.964.471.118	61,64%
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
					1.06.05.2.02			
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
					1.06.05.2.02.03			
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga								
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	69,85%	97,50%	139,58	1.06.05	378.356.244	358.843.895	94,84%
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
					1.06.05.2.02			
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
					1.06.05.2.02.04			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100	1.06.06	196.849.660	178.547.191	90,70%
					Program Penanganan Bencana			
					1.06.06.2.01			
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
					1.06.06.2.01.01			
					Penyediaan Makanan			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100	1.06.06	70.860.000	68.503.280	96,67%
					Program Penanganan Bencana			
					1.06.06.2.01			
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
					1.06.06.2.01.02			
					Penyediaan Sandang			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100	1.06.06	41.970.000	40.856.375	97,35%
					Program Penanganan Bencana			
					1.06.06.2.01			
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
					1.06.06.2.01.03			
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100	1.06.06	64.414.450	58.884.310	91,41%
					Program Penanganan Bencana			
					1.06.06.2.01			
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
					1.06.06.2.01.04			
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100	1.06.06	223.561.926	213.967.950	95,71%
					Program Penanganan Bencana			
					1.06.06.2.01			
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
					1.06.06.2.01.05			
Pelayanan Dukungan Psikososial								
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100	1.06.06	245.565.636	242.677.450	98,82%
					Program Penanganan Bencana			
					1.06.06.2.02			
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
					1.06.06.2.02.01			
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana								

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100	1.06.06	188.464.414	183.311.849	97,27%
					Program Penanganan Bencana			
					1.06.06.2.01			
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
					1.06.06.2.02.02			
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								

Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp. 35.272.253.286,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2022 : Rp. 31.385.954.802,00